



KPKNL
PADANG SIDEMPUAN

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

Tahun Anggaran 2021

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padangsidempuan,
Kepala Kantor,



Raden Hariyadi Murti Kurniawan
NIP 19751007 199602 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANG SIDIMPUAN**

Jalan Kenanga No. 99, Padangsidempuan - 22725
Telepon : 0634-21897 ; Faksimile : 0634-23478 ; Situs : www.djkn.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 (Audited) yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padangsidempuan,

Kepala Kantor,


Raden Hariyadi Murti Kurniawan
NIP 19751007 199602 1 001

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Kualitas Piutang	16
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel 3	DIPA dan Realisasi Tahun 2021	18
Tabel 4	Realisasi Pendapatan Tahun 2021	18
Tabel 5	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan 2020	19
Tabel 6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021	20
Tabel 7	Realisasi Belanja Tahun 2021 dan 2020	21
Tabel 8	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021	22
Tabel 9	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020	23
Tabel 10	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2021	23
Tabel 11	Realisais Belanja Barang TA 2021 dan 2020	24
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	25
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25
Tabel 15	Aset Lancar Tahun 2021 dan 2020	26
Tabel 16	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 dan 2020	26
Tabel 17	Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2021 dan 2020	27
Tabel 18	Rincian Realisasi Persediaan Tahun 2021 dan 2020	27
Tabel 19	Rincian Realisasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2021 dan 2020	28
Tabel 20	Perbandingan saldo menurut LK Tahun 2021 dan 2020	28
Tabel 21	Rincian Tanah Tahun 2021 dan 2020	29
Tabel 22	Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020	30
Tabel 23	Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020	30
Tabel 24	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021 dan 2020	31
Tabel 25	Rincian Aset Lainnya Tahun 2021 dan 2020	32
Tabel 26	Rincian Aset Lain-lain Tahun 2021	32
Tabel 27	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2021	33
Tabel 28	Perbandingan saldo menurut LK Tahun 2021 dan 2020	33

Tabel 29	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2021 dan 2020	34
Tabel 30	Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2021 dan 2020	35
Tabel 31	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2021 dan 2020	35
Tabel 32	Rincian Beban Operasional Tahun 2021 dan 2020	36
Tabel 33	Rincian Beban Pegawai 2021 dan 2020	36
Tabel 34	Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020	37
Tabel 35	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020	37
Tabel 36	Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020	38
Tabel 37	Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020	38
Tabel 38	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020	39
Tabel 39	Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020	40

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 Komposisi Pendapatan Tahun 2021	19
Grafik 2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2021	20
Grafik 3 Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2021	20
Grafik 4 Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021	22
Grafik 5 Komposisi Realisasi Belanja Barang Tahun 2021	24

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.880.581.169,00 atau mencapai 152,74 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.231.244.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp1.966.195.366,00 atau mencapai 94,62 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.077.908.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp19.978.465.570,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp932.999.949,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp19.045.465.621,00 dan Aset Lainnya (neto) Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp828.754.979,00 dan Rp19.149.710.591,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.818.647.929,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.796.744.026,00, terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp21.510.216,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp393.687,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp14.566.585.593,00 ditambah Surplus-LO sebesar Rp393.687,00 ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.582.731.011,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp19.149.710.591,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG SIDIMPUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-21		% Realisasi Anggaran	31-Dec-20
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1,231,244,000	1,880,581,169	152.74	1,052,271,845
JUMLAH PENDAPATAN		1,231,244,000	1,880,581,169	152.74	1,052,271,845
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	835,038,081
Belanja Barang	B.4	1,545,696,000	1,456,069,059	94.20	1,437,545,208
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi		1,545,696,000	1,456,069,059	94.20	2,272,583,289
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.5	532,212,000	510,126,307	95.85	263,407,749
Jumlah Belanja Modal		532,212,000	510,126,307	95.85	263,407,749
JUMLAH BELANJA		2,077,908,000	1,966,195,366	94.62	2,535,991,038

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG SIDIMPUAN NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	36.225.260	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	819.181.550	8.791.404
Persediaan	C.1.4	77.482.639	98.694.010
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.5	110.500	-
Jumlah Aset Lancar		932.999.949	107.485.414
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	14.642.622.000	10.266.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	3.420.112.407	3.494.935.683
Gedung dan Bangunan	C.2.3	4.253.909.333	3.816.522.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.4	-	17.437.750
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5	(3.271.178.119)	(3.119.477.882)
Jumlah Aset Tetap		19.045.465.621	14.475.417.551
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3.1	-	384.800.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	-	(383.909.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	891.000
JUMLAH ASET		19.978.465.570	14.583.793.965
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	828.754.979	17.208.072
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		828.754.979	17.208.072
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	19.149.710.591	14.566.585.893
JUMLAH EKUITAS		19.149.710.591	14.566.585.893
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		19.978.465.570	14.583.793.965

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANG SIDIMPUAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-21	31-Dec-20
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1	1.818.647.929	1.052.271.845
JUMLAH PENDAPATAN		1.818.647.929	1.052.271.845
BEBAN	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	-	835.038.081
Beban Persediaan	D.2.2	121.121.971	148.496.950
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	909.227.528	814.834.311
Beban Pemeliharaan	D.2.4	197.621.099	208.154.573
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	250.466.593	282.074.628
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	318.306.835	295.485.721
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN		1.796.744.026	2.584.084.264
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	21.903.903	(1.531.812.419)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.4	(21.510.216)	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5	-	8.180.675
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.6	(21.510.216)	8.180.675
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		393.687	(1.523.631.744)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	D.7	393.687	(1.523.631.744)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANGSIDIMPUAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-21	31-Dec-20
EKUITAS AWAL	E.1	14.566.585.893	14.477.684.048
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	393.687	(1.523.631.744)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	409.839.583	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	-	-
LAIN-LAIN	E.5	-	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	4.582.731.011	1.612.533.589
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	4.583.124.698	88.901.845
EKUITAS AKHIR	E.8	19.149.710.591	14.566.585.893

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisah dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan

**Rencana
Strategis**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan memiliki wilayah kerja meliputi 3 (tiga) kota yaitu Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, dan Kota Gunungsitoli, dan 11 (sebelas) Kabupaten yaitu, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias, dan Kab. Nias Selatan.

**Tugas dan
Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016, KPKNL Padangsidimpuan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KPKNL Padangsidimpuan menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul penyegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;

7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada KPKNL Padangsidempuan, seluruh pegawai KPKNL Padangsidempuan telah sepakat untuk menjalankan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Visi tersebut merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran KPKNL Padangsidempuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Visi yang ditetapkan dapat diuraikan ke dalam phrasa "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara" adalah KPKNL Padangsidempuan sebagai lembaga/institusi pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan para stakeholder dalam hal penilaian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan serta penatausahaan kekayaan negara termasuk dalam hal pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Hal ini sesuai dengan konsep dimana pengurusan piutang negara termasuk *asset management* dan lelang termasuk *asset disposal*. Selain itu, lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan transaksi masyarakat.

Profesional adalah bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

Akuntabel adalah bahwa pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilakukan secara

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Misi. Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi serta digunakan sebagai pedoman dan landasan kerja. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

**Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan**

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Padangsidimpuan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dimana keduanya sudah diakomodir ke dalam aplikasi SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

**Basis
Akuntansi**

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Dasar
Pengukuran**

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

**Pendapatan-
LRA**

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah Sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

**Penyusutan
Aset Tetap**

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua! Pertama Kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2015 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan telah mengadakan revisi Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak empat kali dari DIPA awal. Pagu awal sebesar Rp2.461.103.000 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp2.077.908.000. Hal ini disebabkan oleh penghematan belanja pemerintah terkait *refocussing* kegiatan dan relokasi anggaran Tahun 2021 dalam rangka penanganan COVID-19. Pagu Anggaran terlihat sebagai berikut ini :

Tabel 3
DIPA dan Revisi Anggaran Tahun 2021

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNB	1,231,244,000	1,231,244,000
Jumlah Pendapatan	1,231,244,000	1,231,244,000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1,877,283,000	1,545,696,000
Belanja Modal	583,820,000	532,212,000
Jumlah Belanja	2,461,103,000	2,077,908,000

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja barang sebesar Rp331.587.000,00 serta pengurangan belanja modal sebesar Rp51.608.000,00.

Realisasi
Pendapatan
Rp1.272.613.069,-

B.1 Pendapatan

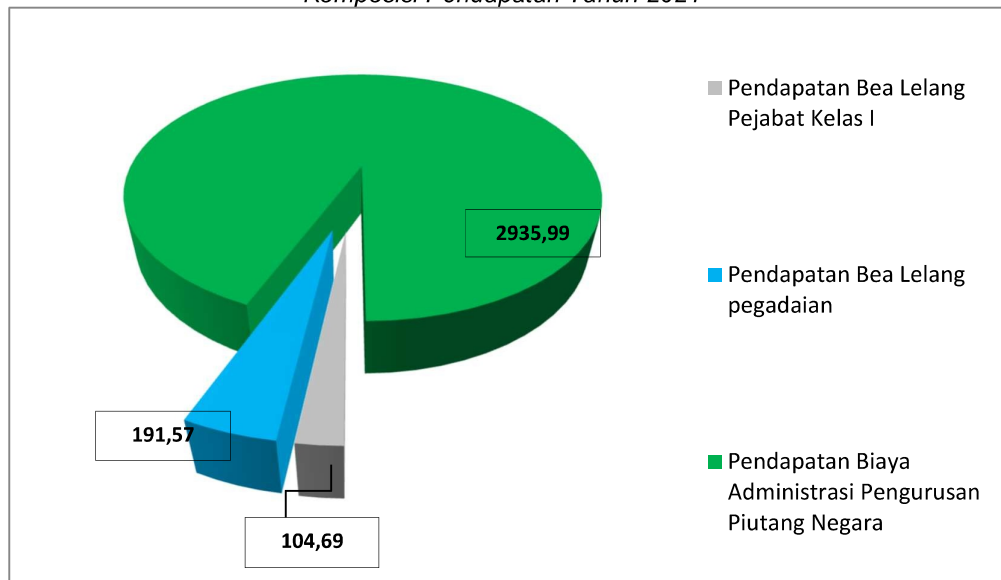
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.272.613.069,00 atau sebesar 103,36 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.231.244.000,00 pada Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan terdiri dari Pendapatan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021

Uraian	31-Dec-21		
	Estimasi	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	704,000,000	737,042,783	104.69
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1,244,000	36,523,755	2,935.99
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	526,000,000	1,007,641,158	191.57
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		15,650,000	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	82,619,000	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1,104,473	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Jumlah Kotor	1,231,244,000	1,880,581,169	152.74
Pengembalian Pendapatan	-	-	-

Komposisi realisasi Pendapatan KPKNL Padangsidempuan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1
Komposisi Pendapatan Tahun 2021



Realisasi Pendapatan Jasa Tahun 2021 mengalami kenaikan 152,74 persen dibandingkan Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pada realisasi pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I, Pendapatan Biaya Admin Piutang Negara dan Pendapatan Bea Lelang Pegadaian.

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31-Dec-21	31-Dec-20	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
	Realisasi	Realisasi		
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	737.042.783	504.389.454	232.653.329	46,13
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	36.523.755	26.703.747	9.820.008	36,77
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.007.641.158	521.178.644	486.462.514	93,34
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	15.650.000			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	82.619.000	-	82.619.000	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.104.473	-	1.104.473	-
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Kotor	1.880.581.169	1.052.271.845	828.309.324	78,72
Pengembalian Pendapatan	-	-	-	-
Jumlah Bersih	1.880.581.169	1.052.271.845	828.309.324	78,72

Realisasi Belanja
Rp1.966.195.366-

B.2. Belanja

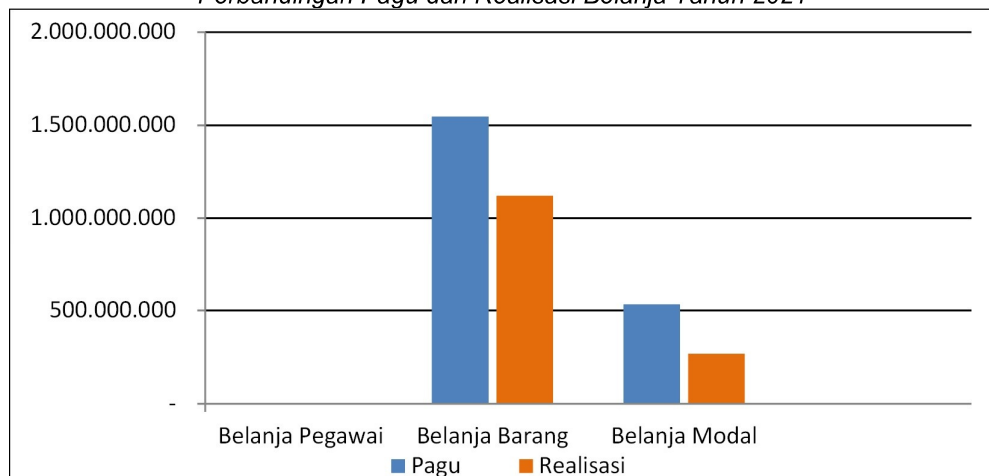
Realisasi Belanja KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.966.195.366,00 atau 94,62 persen dari pagu belanja sebesar Rp2.077.908.000,00. Pada rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021

Uraian	31-Dec-21		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1,545,696,000	1,456,069,059	94.20
Belanja Modal	532,212,000	510,126,307	95.85
Jumlah	2,077,908,000	1,966,195,366	94.62

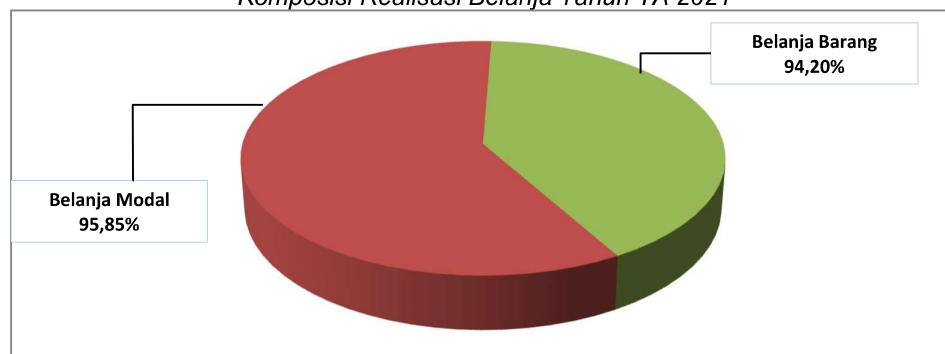
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja untuk Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2021



Komposisi Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3
Komposisi Realisasi Belanja Tahun TA 2021



Perbandingan antara realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada Tahun 2021 dengan periode yang berakhir pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7
Realisasi Belanja Tahun 2021 dan 2020

Uraian	31-Dec-21	31-Dec-20	Kenaikan (Penurunan)	%
	Realisasi	Realisasi		
Belanja Pegawai	-	835,038,081	- 835,038,081	(100.00)
Belanja Barang	1,456,069,059	1,437,545,208	18,523,851	1.29
Belanja Modal	510,126,307	263,407,749	246,718,558	-
Jumlah	1,966,195,366	2,535,991,038	(569,795,672)	(22.47)

Dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun 2020, Realisasi Belanja Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 22,47% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Akun belanja pegawai yang saat ini sudah terpusat dan tidak melalui unit vertikal.
2. Adanya refocusing anggaran tahun 2021.

Belanja Pegawai **Rp0,-**

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00, hal ini dikarenakan akun belanja pegawai yang saat ini sudah terpusat sejak Semester II Tahun Anggaran 2020.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 100 persen. Adapun realisasi Belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0.

Penurunan Belanja Pegawai Tahun 2021 disebabkan antara lain:

1. Akun belanja pegawai yang sudah terpusat sejak Semester II Tahun Anggaran 2020.
- . Perbandingan antara realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	595,938,500	(595,938,500)	(100.00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	10,189	(10,189)	(100.00)
Belanja Tunj. Suami/ Istri PNS	-	34,734,190	(34,734,190)	(100.00)
Belanja Tunj. Anak PNS	-	11,720,902	(11,720,902)	(100.00)
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	36,000,000	(36,000,000)	(100.00)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	8,280,000	(8,280,000)	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	313,900	(313,900)	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	30,416,400	(30,416,400)	(100.00)
Belanja Uang Makan PNS	-	93,524,000	(93,524,000)	(100.00)
Belanja Tunj. Umum PNS	-	24,100,000	(24,100,000)	(100.00)
Belanja Uang Lembur	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	835,038,081	(835,038,081)	(100.00)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-	-
Jumlah Belanja	0	835,038,081	(835,038,081)	(100.00)

Belanja Barang
Rp1.456.069.059,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.456.069.059,00 dan Rp1.437.545.208,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 adalah 94,20 persen dari Pagu Belanja Barang Tahun 2021.

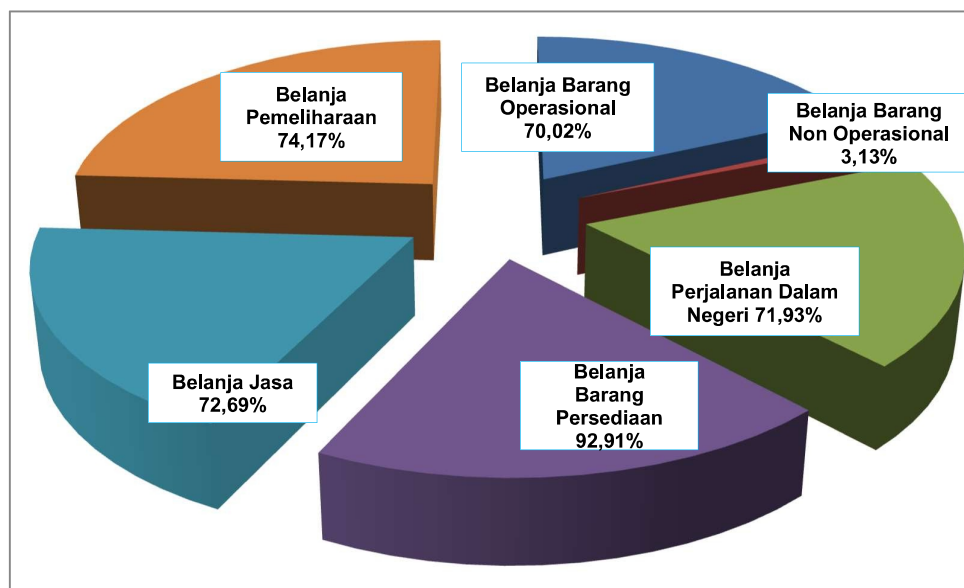
Tabel 10
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021

URAIAN	Pagu	Realisasi 31 Desember 2021	% Realisasi
Belanja Barang Operasional	769.031.000	751.848.671	97,77
Belanja Barang Non Operasional	4.682.000	3.340.700	71,35
Belanja Jasa	161.100.000	152.881.396	94,90
Belanja Pemeliharaan	230.141.000	197.621.099	85,87
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	280.678.000	250.466.593	89,24
Belanja Persediaan	100.064.000	99.910.600	99,85
Jumlah Belanja Kotor	1.545.696.000	1.456.069.059	94,20
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.545.696.000	1.456.069.059	94,20

Apabila dibandingkan dengan periode Tahun 2020, Realisasi Belanja barang untuk periode Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp18.523.851,00 atau 1,29 persen. Hal ini disebabkan oleh penyerapan anggaran yang sudah memenuhi target penyerapan untuk Tahun 2021. Adapun Realisasi Belanja barang untuk periode Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.456.069.059,00.

Komposisi Realisasi Belanja Barang 2021 dapat dilihat dalam grafik:

Grafik 5
Komposisi Realisasi Belanja Barang Tahun 2021



Tabel 11
Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	751,848,671	691,298,972	60,549,699	8.76
Belanja Barang Non Operasional	3,340,700	5,750,000	(2,409,300)	(41.90)
Belanja Jasa	152,881,396	117,015,435	35,865,961	30.65
Belanja Pemeliharaan	197,621,099	208,154,573	(10,533,474)	(5.06)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	250,466,593	282,074,628	(31,608,035)	(11.21)
Belanja Persediaan	99,910,600	133,251,600	(33,341,000)	(25.02)
Jumlah Belanja Kotor	1,456,069,059	1,437,545,208	18,523,851	1.29
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Jumlah Belanja	1,456,069,059	1,437,545,208	18,523,851	1.29

Belanja Modal
Rp510.126.307,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal KPKNL Padangsidimpuan untuk periode Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp510.126.307,00 dan Rp263.407.749,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pagu anggaran belanja modal Tahun 2021 dan sudah terealisasinya belanja modal untuk periode Tahun Anggaran 2021.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Peralatan dan Mesin	90,176,724	88,779,999	1.57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	419,949,583	174,627,750	140.48
Jumlah Belanja Kotor	510,126,307	263,407,749.00	93.66
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	510,126,307	263,407,749	93.66

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp90.176.724,-

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 adalah sebesar Rp90.176.724,00, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2021 dan sudah terealisasinya belanja modal untuk periode Tahun Anggaran 2021.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90,176,724	88,779,999	1.57
Jumlah Belanja Kotor	90,176,724	88,779,999	1.57
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	90,176,724	88,779,999	1.57

**Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp419.949.583,-**

B.5.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp419.949.583,00. Belanja Modal berupa Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp174.627.750,00. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pagu belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2021 serta sudah terealisasinya belanja modal gedung dan bangunan pada Tahun 2021.

*Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan*

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gedung dan Bangunan	419,949,583	174,627,750	140.48
Jumlah Belanja Kotor	419,949,583	174,627,750	140.48
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja	419,949,583	174,627,750	140.48

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp932.999.949,00 dan Rp107.485.414,00 atau naik sebesar 767,92 persen. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15
Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	
			Rupiah	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	36.225.260	-	36.225.260	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	819.181.550	8.791.404	810.390.146	9.217,98
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	110.500	-	110.500	-
Persediaan	77.482.639	98.694.010	(21.211.371)	(21,49)
Jumlah	932.999.949	107.485.414	825.514.535	768,02

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp00,-

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kuitansi UP Yang Belum Dipertanggungjawabkan	-	-	-	-
Uang Tunai (kas dan bank)	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp36.225.260,-

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp36.225.260,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas penerimaan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp819.181.550,-**

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp819.181.550,00 dan Rp8.791.404,00

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang pada bendahara pengeluaran dan bukan berasal dari UP/TUP, setara kas, dan kas lainnya. pada bendahara penerimaan yang bukan merupakan pendapatan satker.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 17
Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 2020*

Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bea Lelang	-	-	-	-
Biaya Administrasi Piutang Negara	-	-	-	-
Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	-	-	-	-
Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	819,181,550	8,791,404	810,390,146	9,218.0
Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	-	-	-	-
Lain-Lain Piutang	-	-	-	-
Lain-Lain Lelang	-	-	-	-
Dana yang masih dalam proses identifikasi	-	-	-	-
Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	-	-	-	-
Jumlah	819,181,550	8,791,404	810,390,146	9,218.0

**Persediaan
Rp77.482.639,-**

C.1.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp77.482.639,00 dan Rp98.694.010,00. Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 18
Rincian Realisasi Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020*

Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Barang Konsumsi	77,482,639	98,694,010	(21,211,371)	-21.49
Jumlah	77,482,639	98,694,010	(21,211,371)	-21.49

**Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp110.500,-**

C.1.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp110.500,00 dan Rp0,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 19
Rincian Realisasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 dan 2020*

Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	110.500	-	110.500	0,00
Jumlah	110.500	-	110.500	0,00

**Aset Tetap
Rp19.045.465.621,-**

C.2 Aset Tetap

Aset tetap KPKNL Padangsidimpuan berdasarkan saldo menurut Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

*Tabel 20
Perbandingan saldo menurut LK per 31 Desember 2021 dan 2020*

Jenis Aset	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	14,642,622,000	10,266,000,000	4,376,622,000	42.6322
Peralatan dan Mesin	3,420,112,407	3,494,935,683	(74,823,276)	-2.1
Gedung dan Bangunan	4,253,909,333	3,816,522,000	437,387,333	11.46036
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	17,437,750	(17,437,750)	0
Akumulasi Penyusutan	(3,271,178,119)	(3,119,477,882)		
Jumlah	19,045,465,621	14,475,417,551	4,376,622,000	52.0

Tanah**Rp14.642.622.000,-****C.2.1 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki KPKNL Padangsidempuan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.642.622.000,00 dan Rp10.266.000.000,00.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Tabel 21
Rincian Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari	10,266,000,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	4,376,622,000
Mutasi kurang:	-
Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2021	14,642,622,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	14,642,622,000

Terdapat transfer masuk tanah (pengalihan aset berupa tanah dan bangunan dari KPP Pratama Padangsidempuan kepada KPKNL Padangsidempuan) berupa 8 bidang tanah dan bangunan. Tanah seluas 3540 m² yang terletak di Jl. Kenanga No. 99, Padangsidempuan pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan sendiri untuk kegiatan operasional.

Peralatan dan Mesin**Rp3.420.112.407,-****C.2.2 Peralatan dan Mesin**

Nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.420.112.407,00 dan Rp3.494.935.683,00. Dalam periode Tahun 2021 terdapat penambahan aset peralatan dan mesin.

Adapun mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 22
Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020

Saldo per 31 Desember 2020	3,494,935,683
Mutasi tambah:	-
Pembelian	90,176,724
Pengembangan nilai aset	-
Reklas masuk	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Penghapusan	165,000,000
Reklas keluar	-
Saldo per 31 Desember 2021	3,420,112,407
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	2,885,710,062
Nilai Buku per 31 Desember 2021	534,402,345

Mutasi tambah:

- a. Pembelian alat kantor berupa Lemari Es sebesar Rp2.530.000,00.
- b. Pembelian alat kantor berupa A.C sebesar Rp17.798.000,00
- c. Pembelian alat kantor Filing Cabinet sebesar Rp17.710.000,00.
- d. Pembelian alat kantor berupa Alat Penghancur Kertas sebesar Rp2.810.500,00.
- e. Pembelian alat kantor berupa Vertikal Blind sebesar Rp49.328.224,00.

Mutasi Kurang:

- a. Penghapusan sebesar Rp165.000.000,00.

Gedung dan Bangunan
Rp4,253.909.333,-

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.253.909.333,00 dan Rp3.816.522.000,00. Rincian mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020

Saldo per 01 Januari 2021	3,816,522,000
Mutasi tambah:	
Pembangunan gedung	437,387,333
Transfer Masuk	131,741,000
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	131,741,000
Saldo per 31 Desember 2021	4,253,909,333
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	385,468,057
Nilai Buku per 31 Desember 2021	3,868,441,276

Terdapat mutasi tambah aset tetap gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2021 yaitu transfer masuk pengalihan gedung dan bangunan dari KPP Pratama Padangsidimpuan kepada KPKNL Padangsidimpuan sejumlah Rp131.741.000,00 serta pendefinitifan pengembangan nilai gedung melalui KDP sebesar Rp437.387.333,00.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp0,-**

C.2.4 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp17.437.750,00, hal ini dikarenakan belanja modal pekerjaan bangunan gedung kantor yang sudah terealisasi sebagai penambahan nilai bangunan gedung kantor pada tahun 2021.

**Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp3.271.178.119,-**

C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.271.178.119,00 dan Rp3.119.477.882,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 24
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020*

No	Aset Tetap	Nilai 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	14,642,622,000	0	14,642,622,000
2	Peralatan dan Mesin	3,420,112,407	2,885,710,062	534,402,345
3	Gedung dan Bangunan	4,253,909,333	385,468,057	3,868,441,276
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		22,316,643,740	3,271,178,119	19,045,465,621

Aset Lainnya
Rp0,-

C.3 Aset Lainnya

Nilai Aset lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp891.000. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020

Jenis Aset	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Lain-lain	-	891,000	(891,000)	-100
Jumlah	-	891,000	(891,000)	-100

Aset Lain-lain
Rp0,-

C.3.1 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0,00 dan Rp384.800.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26
Rincian Aset Lain-lain Tahun 2021

Saldo per 01 Januari 2021	384,800,000
Mutasi tambah:	
- Penghentian aset dari penggunaan	
Mutasi kurang:	
- Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	
- Penghapusan BMN	384,800,000
Saldo per 31 Desember 2021	0
Nilai Buku per 31 Desember 2021	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp0,-**

C.3.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp383.909.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per jenis aset per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 27
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021*

No	Aset Tetap	Nilai per 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per jenis aset per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Lampiran Aset Lainnya.

**Kewajiban Jangka
Pendek
Rp828.754.979,-**

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp828.754.979,00 dan Rp17.208.072,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek ini terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga I dan Uang Muka dari KPPN. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 28
Perbandingan saldo menurut LK 31 Desember 2021 dan 2020*

Jenis Aset	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	828,754,979	17,208,072	811,546,907	4716.08
Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-	-	-
Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-
Jumlah	828,754,979	17,208,072	811,546,907	4716.08

**Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp828.754.979,-**

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp828.754.979,00 dan Rp17.208.072,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban

yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perolehan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per akun, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Akun	Uraian Akun	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	
				Rupiah	%
212192	Dana Pihak Ketiga	819,181,550	8,791,404	810,390,146	9217.98
212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	0	0	0	0.00
212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	9,573,429	8,416,668	1,156,761	13.74
Total		828,754,979	17,208,072	811,546,907	9231.73

Uang Muka dari KPPN
Rp0,-

C.4.2 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas
Rp19.149.710.591,-

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.149.710.591,00 dan Rp14.566.585.893,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional periode 31 Desember 2021 disandingkan dengan Laporan Operasional periode 31 Desember 2020.

**Pendapatan
Operasional
Rp1.818.647.929,-**

D.1 Pendapatan Kegiatan Operasional

Pendapatan Operasional pada KPKNL Padangsidimpuan adalah sebesar Rp1.818.647.929,00 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

*Tabel 30
Rincian Kegiatan Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Perpajakan	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.818.647.929	1.052.271.845	72,83
Jumlah	1.818.647.929	1.052.271.845	72,83

**Pendapatan PNB
Rp1.818.537.429,-**

D.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.818.537.429,00 dan Rp1.052.271.845,00. Jika dibandingkan dengan PNB periode 31 Desember 2020, maka mengalami kenaikan sebesar Rp766.265.584,00 atau 72,82 persen. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Rincian pendapatan penerimaan negara bukan pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 31
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan			-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	737.042.783	504.389.454	232.653.329	46,13
Pendapatan Biad Piutang Negara	36.523.755	26.703.747	9.820.008	36,77
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.007.641.158	521.178.644	486.462.514	93,34
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	15.650.000		15.650.000	
Pendapatan dari Pemindah Tanganan BMN Lainnya	82.619.000	-		
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.104.473		1.104.473	-
Jumlah	1.880.581.169	1.052.271.845	828.309.324	78,72

Beban Operasional
Rp1.796.744.026,-

D.2 Beban Operasional

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas.

Beban Operasional pada KPKNL Padangsidempuan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.796.744.026,00 dan Rp2.584.084.264,00

Rincian Beban Operasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32
Rincian Beban Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	-	835,038,081	(835,038,081)	(100.00)
Beban Persediaan	121,121,971	148,496,950	(27,374,979)	(18.43)
Beban Barang dan Jasa	909,227,528	814,834,311	94,393,217	11.58
Beban Pemeliharaan	197,621,099	208,154,573	(10,533,474)	(5.06)
Beban Perjalanan Dinas	250,466,593	282,074,628	(31,608,035)	(11.21)
Beban Penyusutan Amortisasi	318,306,835	295,485,721	22,821,114	7.72
Jumlah	1,796,744,026	2,584,084,264	(787,340,238)	(30.47)

Beban Pegawai
Rp0,-

D.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp835.038.081,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 33
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji	0	835,038,081	(835,038,081)	(100.00)
Beban Lembur	-	-	-	-
Jumlah	0	835,038,081	(835,038,081)	(100.00)

Beban Persediaan
Rp121.121.971,-

D.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp121.121.971,00 dan Rp148.496.950,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 34
Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	121,121,971	148,496,950	(27,374,979)	(18.43)
Jumlah Beban Persediaan	121,121,971	148,496,950	(27,374,979)	(18.43)

**Beban Barang dan
Jasa**
Rp909.227.528,-

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa adalah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp909.227.528,00 dan Rp814.834.311,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena pengguna alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	480,538,585	426,297,910	54,240,675	12.72
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	12,219,400		
Beban Barang Operasional -Penanganan Pandemi Covid	52,117,066	46,848,462	5,268,604	0.00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	23,138,520	25,644,100	(2,505,580)	(9.77)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	144,480,000	156,000,000	(11,520,000)	(7.38)
Beban Barang Operasional Lainnya	51,574,500	24,289,100	27,285,400	0.00
Beban Bahan	3,064,800	5,750,000	(2,685,200)	(46.70)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	275,900	0	275,900	0.00
Beban Langganan Listrik	98,885,354	91,289,194	7,596,160	8.32
Beban Langganan Telepon	12,538,323	9,013,725	3,524,598	39.10
Beban Langganan Air	6,402,980	4,347,420	2,055,560	47.28
Beban Jasa- Penanganan Pandemi Covid	22,411,500	13,135,000	9,276,500	70.62
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	-	0.00
Beban Sewa	13,800,000		13,800,000	0.00
Jumlah	909,227,528	814,834,311	94,393,217	11.58

**Beban
Pemeliharaan
Rp197.621.099,-**

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp197.621.099,00 dan Rp208.154.573,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode tersebut adalah sebagai berikut:

*Tabel 36
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84,722,000	91,056,304	(6,334,304)	(6.96)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112,899,099	117,098,269	(4,199,170)	(3.59)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	-	0.00
Jumlah	197,621,099	208,154,573	(10,533,474)	(5.06)

**Beban Perjalanan
Dinas
Rp250.466.593,-**

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp250.466.593,00 dan Rp282.074.628,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh berakhirnya kegiatan revaluasi serta melakukan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 37
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	234,366,593	271,274,628	(36,908,035)	(13.61)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,100,000	10,800,000	5,300,000	100.00
Jumlah	250,466,593	282,074,628	(31,608,035)	(11.21)

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp318.306.835,-

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp318.306.835,00 dan Rp295.485.721,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 38
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	224,232,357	210,105,134	14,127,223	6.72
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	92,467,880	85,083,587	7,384,293	8.68
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,606,598	297,000	1,309,598	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	318,306,835	295,485,721	22,821,114	7.72

Surplus /(Defisit) dari Kegiatan Operasional
Rp21.903.903,-

D.3 Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas selama satu periode Pelaporan. Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp21.903.903,00 dan (Rp1.531.812.419,00). Defisit Kegiatan Operasional merupakan selisih antara total Pendapatan Operasional sebesar Rp1.818.647.929,00 dan total beban Operasional sebesar Rp1.796.744.026,00.

Surplus /(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar
(Rp21.510.216,-)

D.4 Surplus/ Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban kerugian pelepasan aset non lancar. Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Defisit Rp21.510.216,00 dan Rp0,00. Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2021 merupakan selisih dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp98.269.000,00 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp119.779.216,00.

Surplus /(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp0,-

D.5 Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00. Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan selisih antara total Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00 dan total Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

Surplus /(Defisit)
dari Kegiatan
Operasional
(Rp21.510.216,-)

D.6 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah Defisit Rp21.510.216,00 dan Surplus Rp8.180.675,00.

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39
Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(21,510,216)	-	(21,510,216)	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	8,180,675	(8,180,675)	(100.00)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	106,898,315	(106,898,315)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	98,717,640	(98,717,640)	(100.00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	(21,510,216)	8,180,675	(29,690,891)	(362.94)

Surplus/Defisit
laporan
Operasional
Rp393.687,-

D.7 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Nilai Surplus/Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2021 adalah Surplus sebesar Rp393.687,00. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah antara Surplus Kegiatan Operasional sebesar Rp21.903.903,00 dan Defisit Kegiatan Non Operasional Sebesar Rp21.510.216,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas KPKNL Padangsidempuan adalah kekayaan bersih KPKNL Padangsidempuan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban KPKNL Padangsidempuan pada laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dengan periode sebelumnya.

*Ekuitas Awal
Rp14.566.585.983,-*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.566.585.893,00 dan Rp14.477.684.048,00.

*Surplus LO
Rp393.687,-*

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp393.687,00 dan (Rp1.523.631.744,00). Surplus LO merupakan selisih tambah antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
/Kesalahan
Mendasar Rp0,-*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00.

*Koreksi Yang
Mengurangi
Ekuitas Rp0,-*

E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0,-*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,-*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

**Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,-**

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

**Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-**

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi sebidang tanah dan bangunan milik satker di Jl. Kenanga No.99 Padangsidempuan.

**Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-**

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00.

Lain-Lain Rp0,-

E.5 Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

**Transaksi Antar
Entitas
Rp4.582.731.011,-**

E.6 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima Dari Entitas Lain. Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp4.582.731.011,00 dan Rp1.612.533.589,00.

**Kenaikan Ekuitas
Rp4.583.124.698,-**

E.7 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan Ekuitas terjadi karena adanya penambahan nilai asset. Kenaikan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah Rp4.583.124.698,00 dan penurunan nilai ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp88.901.845,00.

**Ekuitas Akhir
Rp19.149.710.591,-**

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.149.710.591,00 dan Rp14.566.585.893,00. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal, ekuitas, surplus/defisit LO, penyesuaian nilai tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan medasar dan transaksi antar entitas.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, telah terbit DIPA Revisi Keempat dengan rincian sebagai berikut :

Output	Pagu Semula	Pagu Setelah Revisi
015.09.4796.BMB.001	10.500.000	100.000
015.09.4796.BMB.002	8.750.000	120.000
015.09.4797.FAE.001	23.642.000	
015.09.4798.AAH.001	44.920.000	42.020.000
015.09.4798.AAH.002	7.490.000	5.488.000
015.09.4798.AAH.003	36.200.000	32.100.000
015.09.4798.FAE.001	14.496.000	13.216.000
015.09.4798.FAE.003	77.940.000	36.336.000
015.09.4798.FAE.005	18.840.000	8.772.000
015.09.4798.FAE.006	13.480.000	7.026.000
015.09.4700.EAG.001	24.134.000	13.358.000
015.09.4701.EAC.001	1.072.199.000	1.030.195.000
015.09.4701.EAC.002	217.544.000	114.684.000
015.09.4701.EAD.001	138.230.000	122.620.000
015.09.4701.EAD.002	96.096.000	90.178.000
015.09.4701.EAE.001	134.790.000	107.521.000
015.09.4701.EAE.002	487.724.000	442.034.000
015.09.4702.BMB.003	15.288.000	5.680.000
015.09.4704.EAK.001	18.840.000	6.460.000

Lampiran A1

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Sidempuan
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Total Akm. Peny.	Nilai Buku
				per 31-12-21	per 31-12-21	per 31-12-21	per 31-12-21
A	Tanah						
1	Tanah Persil	5827	14,642,622,000	-	-	-	14,642,622,000
	Jumlah		14,642,622,000	-	-	-	14,642,622,000
B	Peralatan dan Mesin	580					
1	Alat Bantu	1	246,125,000	87,901,785	-	87,901,785	158,223,215
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	9	720,962,499	696,384,429	-	696,384,429	24,578,070
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1	1,750,000	1,750,000	-	1,750,000	-
4	Alat Bengkel Tak Bermesin	2	737,000	737,000	-	737,000	-
5	Alat Ukur	8	15,440,987	14,516,889	-	14,516,889	924,098
6	Alat Kantor	120	634,851,550	563,364,075	-	563,364,075	71,487,475
7	Alat Rumah Tangga	325	659,320,709	509,204,264	-	509,204,264	150,116,445
8	Alat Studio	16	254,178,535	210,821,197	-	210,821,197	43,357,338
9	Alat Komunikasi	13	16,617,000	16,617,000	-	16,617,000	-
10	Komputer Unit	36	530,451,430	484,413,125	-	484,413,125	46,038,305
11	Peralatan Komputer	49	346,700,198	306,615,548	-	306,615,548	40,084,650
	Jumlah		3,427,134,908	2,892,325,312	-	2,892,325,312	534,809,596
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	4,253,909,333	385,468,057	-	385,468,057	3,868,441,276
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3	44,000,000	11,880,000	-	11,880,000	32,120,000
	Jumlah		4,297,909,333	397,348,057	-	397,348,057	3,900,561,276
D	Jaringan						
1	Jaringan Listrik		-	-	-	-	-
2	Jaringan Telepon		-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
F	Aset Tetap Lainnya						
1	Barang bercorak kesenian		-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
G	Aset Lainnya						
1	Aset Tak Berwujud*		-	-	-	-	-
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		13,500,000	3,645,000	-	3,645,000	9,855,000
	Jumlah		13,500,000	3,645,000	-	3,645,000	9,855,000
	Total		22,381,166,241	3,293,318,369	-	3,293,318,369	19,087,847,872

* *Beban Amortisasi*

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PER 31 DESEMBER 2021

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUN 506090

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 23/05/22 3:08 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif -

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1,231,244,000	1,880,581,169	649,337,169	153	1,422,122,000	1,052,271,845	(369,850,155)	74
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,231,244,000	1,880,581,169	649,337,169	153	1,422,122,000	1,052,271,845	(369,850,155)	153
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	864,013,000	835,038,081	(28,974,919)	97
	BELANJA BARANG	1,545,696,000	1,456,069,059	(89,626,941)	94	1,570,979,000	1,437,545,208	(133,433,792)	92
	BELANJA MODAL	532,212,000	510,126,307	(22,085,693)	96	263,418,000	263,407,749	(10,251)	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	2,077,908,000	1,966,195,366	(111,712,634)	95	2,698,410,000	2,535,991,038	(162,418,962)	95
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	Kode Lap : LRA.B.S.
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Tanggal : 23/05/22 3:09 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 002	Kanwil DJKN Sumatera Utara	Halaman : 1
SATUAN KERJA	: 506090	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUN	Prg ID : lap_lra_bel_akun --
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	491,145,000	482,731,000	480,538,585	0	480,538,585	99.55	2,192,415
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	54,000,000	23,184,000	23,138,520	0	23,138,520	99.8	45,480
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	144,480,000	144,480,000	144,480,000	0	144,480,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	56,134,000	53,446,000	51,574,500	0	51,574,500	96.5	1,871,500
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	19,720,000	65,190,000	52,117,066	0	52,117,066	79.95	13,072,934
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	765,479,000	769,031,000	751,848,671	0	751,848,671	97.77	17,182,329
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	47,952,000	3,340,000	3,064,800	0	3,064,800	91.76	275,200
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,054,000	1,342,000	275,900	0	275,900	20.56	1,066,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	53,006,000	4,682,000	3,340,700	0	3,340,700	71.35	1,341,300
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	129,370,000	100,064,000	99,910,600	0	99,910,600	99.85	153,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	129,370,000	100,064,000	99,910,600	0	99,910,600	99.85	153,400
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	114,000,000	99,300,000	98,096,548	0	98,096,548	98.79	1,203,452
522112	Belanja Langganan Telepon	16,800,000	12,600,000	12,061,128	0	12,061,128	95.72	538,872
522113	Belanja Langganan Air	9,600,000	6,600,000	6,512,220	0	6,512,220	98.67	87,780
522141	Belanja Sewa	18,950,000	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	18,000,000	28,800,000	22,411,500	0	22,411,500	77.82	6,388,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	177,350,000	161,100,000	152,881,396	0	152,881,396	94.9	8,218,604
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	134,790,000	107,521,000	84,722,000	0	84,722,000	78.8	22,799,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138,230,000	122,620,000	112,899,099	0	112,899,099	92.07	9,720,901
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	273,020,000	230,141,000	197,621,099	0	197,621,099	85.87	32,519,901
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	441,618,000	258,898,000	234,366,593	0	234,366,593	90.52	24,531,407
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,440,000	21,780,000	16,100,000	0	16,100,000	73.92	5,680,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	479,058,000	280,678,000	250,466,593	0	250,466,593	89.24	30,211,407
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,877,283,000	1,545,696,000	1,456,069,059	0	1,456,069,059	94.2	89,626,941
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96,096,000	90,178,000	90,176,724	0	90,176,724	100	1,276

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	Kode Lap : LRA.B.S.
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Tanggal : 23/05/22 3:09 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 002	Kanwil DJKN Sumatera Utara	Halaman : 2
SATUAN KERJA	: 506090	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN	Prg ID : lap_lra_bel_akun --
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	96,096,000	90,178,000	90,176,724	0	90,176,724	100	1,276
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	487,724,000	442,034,000	419,949,583	0	419,949,583	95	22,084,417
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	487,724,000	442,034,000	419,949,583	0	419,949,583	95	22,084,417
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	583,820,000	532,212,000	510,126,307	0	510,126,307	95.85	22,085,693
	JUMLAH BELANJA	2,461,103,000	2,077,908,000	1,966,195,366	0	1,966,195,366	94.62	111,712,634

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 ESELON I WILAYAH/PROVINSI SATUAN KERJA	KEMENTERIAN KEUANGAN DITJEN KEKAYAAN NEGARA SUMATERA UTARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN	Kode Lap : LRA.P.E1.1 Tanggal : 23/05/22 3:10 AM Halaman : 1 Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --
--	---	---

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	15,650,000	0	15,650,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	82,619,000	0	82,619,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	98,269,000	0	98,269,000	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	704,000,000	737,042,783	0	737,042,783	104.69
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	526,000,000	1,007,641,158	0	1,007,641,158	191.57
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1,244,000	36,523,755	0	36,523,755	2935.99
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	1,231,244,000	1,781,207,696	0	1,781,207,696	144.67
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,104,473	0	1,104,473	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	1,104,473	0	1,104,473	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,231,244,000	1,880,581,169	0	1,880,581,169	152.74
	JUMLAH PENDAPATAN	1,231,244,000	1,880,581,169	0	1,880,581,169	152.74

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 506090

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUN

Tgl. Cetak 23/05/2022 3:09 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	8,791,404	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	98,694,010	0
0.0	131111	Tanah	10,266,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,494,935,683	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,816,522,000	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	17,437,750	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,826,477,705
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	293,000,177
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	384,800,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	383,909,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	8,416,668
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	8,791,404
0.0	391111	Ekuitas	0	14,566,585,893
JUMLAH			18,087,180,847	18,087,180,847

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 09

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

KDUAPPAW : 01509002KD

Kanwil DJKN Sumatera Utara

KODE SATKER : 506090

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUN

Tgl. Cetak 23/05/2022 3:08 AM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	36,225,260	0	36,225,260	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	819,181,550	8,791,404	810,390,146	9,217.98
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	110,500	0	110,500	0.00
Persediaan	77,482,639	98,694,010	(21,211,371)	(21.49)
JUMLAH ASET LANCAR	932,999,949	107,485,414	825,514,535	768.02
ASET TETAP				
Tanah	14,642,622,000	10,266,000,000	4,376,622,000	42.63
Peralatan dan Mesin	3,420,112,407	3,494,935,683	(74,823,276)	(2.14)
Gedung dan Bangunan	4,253,909,333	3,816,522,000	437,387,333	11.46
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	17,437,750	(17,437,750)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,271,178,119)	(3,119,477,882)	(151,700,237)	4.86
JUMLAH ASET TETAP	19,045,465,621	14,475,417,551	4,570,048,070	31.57
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	384,800,000	(384,800,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(383,909,000)	383,909,000	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	891,000	(891,000)	(100.00)
JUMLAH ASET	19,978,465,570	14,583,793,965	5,394,671,605	36.99
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	828,754,979	17,208,072	811,546,907	4,716.08
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	828,754,979	17,208,072	811,546,907	4,716.08
JUMLAH KEWAJIBAN	828,754,979	17,208,072	811,546,907	4,716.08
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	19,149,710,591	14,566,585,893	4,583,124,698	31.46
JUMLAH EKUITAS	19,149,710,591	14,566,585,893	4,583,124,698	31.46
JUMLAH EKUITAS	19,149,710,591	14,566,585,893	4,583,124,698	31.46
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	19,978,465,570	14,583,793,965	5,394,671,605	36.99

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 506090

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUN

Tgl. Cetak 23/05/2022 3:08 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	36,225,260	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	819,181,550	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	110,500	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	77,482,639	0
0.0	131111	Tanah	14,642,622,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,420,112,407	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,253,909,333	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,885,710,062
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	385,468,057
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	9,573,429
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	819,181,550
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,966,195,366
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,880,581,169	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	4,497,116,814
0.0	391111	Ekuitas	0	14,566,585,893
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	15,650,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	82,619,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	110,500
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	773,268,043
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,007,641,158
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	36,523,755
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,104,473
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	480,538,585	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	23,138,520	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	144,480,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	51,574,500	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	52,117,066	0
3.0	521211	Beban Bahan	3,064,800	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	275,900	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	98,885,354	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	12,538,323	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 506090

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUN

Tgl. Cetak 23/05/2022 3:08 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Beban Langganan Air	6,402,980	0
3.0	522141	Beban Sewa	13,800,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	22,411,500	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84,722,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112,899,099	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	234,366,593	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,100,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	224,232,357	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	92,467,880	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,606,598	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	121,121,971	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	119,779,216	0
JUMLAH			27,046,748,100	27,046,748,100

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 002
SATUAN KERJA : 506090
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KANWIL II DJKN MEDAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANGSIDEMPUAN

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 23/05/22 3:08 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,818,647,929	1,052,271,845	766,376,084	72.831
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,818,647,929	1,052,271,845	766,376,084	72.831
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,818,647,929	1,052,271,845	766,376,084	72.831
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	835,038,081	(835,038,081)	(100)
Beban Persediaan	121,121,971	148,496,950	(27,374,979)	(18.435)
Beban Barang dan Jasa	909,227,528	814,834,311	94,393,217	11.584
Beban Pemeliharaan	197,621,099	208,154,573	(10,533,474)	(5.06)
Beban Perjalanan Dinas	250,466,593	282,074,628	(31,608,035)	(11.206)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 002	KANWIL II DJKN MEDAN	Tanggal : 23/05/22 3:08 AM
SATUAN KERJA	: 506090	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG	Halaman : 2
JENIS SATUAN KERJA	: KD	PADANGSIDEMPUAN	Prg ID : lap_lo_satker --
			Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	318,306,835	295,485,721	22,821,114	7.723
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,796,744,026	2,584,084,264	(787,340,238)	(30.469)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	21,903,903	(1,531,812,419)	1,553,716,322	(101.43)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(21,510,216)	0	(21,510,216)	()
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	98,269,000	0	98,269,000	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	119,779,216	0	119,779,216	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	8,180,675	(8,180,675)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	106,898,315	(106,898,315)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	98,717,640	(98,717,640)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(21,510,216)	8,180,675	(29,690,891)	(362.939)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	393,687	(1,523,631,744)	1,524,025,431	(100.026)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	393,687	(1,523,631,744)	1,524,025,431	(100.026)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI	: 0700	SUMATERA UTARA
JENIS SATUAN KERJA	: KD	
SATUAN KERJA	: 506090	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUN

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 23/05/22 3:08 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	14,566,585,893	14,477,684,048	88,901,845	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	393,687	(1,523,631,744)	1,524,025,431	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,582,731,011	1,612,533,589	2,970,197,422	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4,583,124,698	88,901,845	4,494,222,853	-
EKUITAS AKHIR	19,149,710,591	14,566,585,893	4,583,124,698	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRASS
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 1
Prog Id : lu_pasik

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1,231,244,000	1,880,581,169	649,337,169	152,74	1,422,122,000	1,052,271,845	(369,850,155)	73,99
A.I.1	Penerimaan Dalam Negeri	1,231,244,000	1,880,581,169	649,337,169	152,74	1,422,122,000	1,052,271,845	(369,850,155)	73,99
A.I.1.a	Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-	0	0	0	-
A.I.1.b	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,231,244,000	1,880,581,169	649,337,169	152,74	1,422,122,000	1,052,271,845	(369,850,155)	73,99
A.I.2	Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,231,244,000	1,880,581,169	649,337,169	152,74	1,422,122,000	1,052,271,845	(369,850,155)	73,99
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI	2,077,908,000	1,966,195,366	(111,712,634)	94,62	2,698,410,000	2,535,991,038	(162,418,962)	93,98
B.I.1	Rupiah Murni	2,077,908,000	1,966,195,366	(111,712,634)	94,62	2,698,410,000	2,535,991,038	(162,418,962)	93,98
B.I.1.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-	864,013,000	835,038,081	(28,974,919)	96,65
B.I.1.b	Belanja Barang	1,545,696,000	1,456,069,059	(89,626,941)	94,20	1,570,979,000	1,437,545,208	(133,433,792)	91,51
B.I.1.c	Belanja Modal	532,212,000	510,126,307	(22,085,693)	95,85	263,418,000	263,407,749	(10,251)	100,00
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.1.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	-	0	0	0	-
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	-	0	0	0	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRASS
 Tanggal : 25-05-2022
 Halaman : 2
 Prog Id : lu_pasik

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
 SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.1.2.c	Belanja Modal	0	0	0	-	0	0	0	-
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-	0	0	0	-
B.1.2.e	Subsidi	0	0	0	-	0	0	0	-
B.1.2.f	Hibah	0	0	0	-	0	0	0	-
B.1.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	-	0	0	0	-
B.1.2.h	Belanja Lain-Lain	0	0	0	-	0	0	0	-
	JUMLAH BELANJA NEGARA	2,077,908,000	1,966,195,366	(111,712,634)	94,62	2,698,410,000	2,535,991,038	(162,418,962)	93,98
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	-	0	0	0	-
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	-	0	0	0	-
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	-	0	0	0	-
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
C.II.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	-	0	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	-	0	0	0	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TRANSAKSI KAS								
A	RUPIAH MURNI								
0	RM								
01	PELAYANAN UMUM								
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI								
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko								
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi								
BMB	Komunikasi Publik								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	19,250,000	220,000	0	0	0	0	0.00	220,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	19,250,000	220,000	0	0	0	0	0.00	220,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	19,250,000	220,000	0	0	0	0	0.00	220,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.BMB	19,250,000	220,000	0	0	0	0	0.00	220,000

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 2
Prog Id : lu_lrabstkb

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4796	19,250,000	220,000	0	0	0	0	0.00	220,000
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko								
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	23,642,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	23,642,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	23,642,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4797.FAE	23,642,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4797	23,642,000	0	0	0	0	0	0.00	0
4798	Pengelolaan Aset								
AAH	Peraturan lainnya								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,610,000	73,488,000	0	71,406,000	0	71,406,000	97.17	2,082,000

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 3
Prog Id : lu_lrabstkb

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000	6,120,000	0	3,800,000	0	3,800,000	62.09	2,320,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88,610,000	79,608,000	0	75,206,000	0	75,206,000	94.47	4,402,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	88,610,000	79,608,000	0	75,206,000	0	75,206,000	94.47	4,402,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	88,610,000	79,608,000	0	75,206,000	0	75,206,000	94.47	4,402,000
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	4,108,000	3,120,000	3,064,800	3,064,800	0	3,064,800	98.23	55,200
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	4,108,000	3,120,000	3,064,800	3,064,800	0	3,064,800	98.23	55,200
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103,968,000	56,170,000	2,000,000	48,098,000	0	48,098,000	85.63	8,072,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,680,000	6,060,000	800,000	3,600,000	0	3,600,000	59.41	2,460,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120,648,000	62,230,000	2,800,000	51,698,000	0	51,698,000	83.08	10,532,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN**

TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 4
Prog Id : lu_lrabstkb

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	124,756,000	65,350,000	5,864,800	54,762,800	0	54,762,800	83.80	10,587,200
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	124,756,000	65,350,000	5,864,800	54,762,800	0	54,762,800	83.80	10,587,200
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4798	213,366,000	144,958,000	5,864,800	129,968,800	0	129,968,800	89.66	14,989,200
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.CD	256,258,000	145,178,000	5,864,800	129,968,800	0	129,968,800	89.52	15,209,200
WA	Program Dukungan Manajemen								
4700	Legislasi dan Litigasi								
EAG	Layanan Hukum								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,054,000	1,342,000	75,900	275,900	0	275,900	20.56	1,066,100
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	5,054,000	1,342,000	75,900	275,900	0	275,900	20.56	1,066,100
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,400,000	10,816,000	592,000	9,764,000	0	9,764,000	90.27	1,052,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,680,000	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 5
Prog Id : lu_lrbstkb

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19,080,000	12,016,000	592,000	10,964,000	0	10,964,000	91.25	1,052,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	24,134,000	13,358,000	667,900	11,239,900	0	11,239,900	84.14	2,118,100
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4700.EAG	24,134,000	13,358,000	667,900	11,239,900	0	11,239,900	84.14	2,118,100
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4700	24,134,000	13,358,000	667,900	11,239,900	0	11,239,900	84.14	2,118,100
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum								
EAC	Layanan Umum								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5211	Belanja Barang Operasional								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	491,145,000	482,731,000	71,481,711	480,538,585	0	480,538,585	99.55	2,192,415
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	54,000,000	23,184,000	3,160,000	23,138,520	0	23,138,520	99.80	45,480
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	144,480,000	144,480,000	24,080,000	144,480,000	0	144,480,000	100.00	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	56,134,000	53,446,000	0	51,574,500	0	51,574,500	96.50	1,871,500
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	19,720,000	65,190,000	0	52,117,066	0	52,117,066	79.95	13,072,934
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Operasional	765,479,000	769,031,000	98,721,711	751,848,671	0	751,848,671	97.77	17,182,329

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 6
Prog Id : lu_lrabstkb

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5212	Belanja Barang Non Operasional								
521211	Belanja Bahan	952,000	0	0	0	0	0	0.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Non Operasional	952,000	0	0	0	0	0	0.00	0
5218	Belanja Barang Persediaan								
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	129,370,000	100,064,000	0	99,910,600	0	99,910,600	99.85	153,400
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Barang Persediaan	129,370,000	100,064,000	0	99,910,600	0	99,910,600	99.85	153,400
5221	Belanja Jasa								
522111	Belanja Langganan Listrik	114,000,000	99,300,000	7,808,601	98,096,548	0	98,096,548	98.79	1,203,452
522112	Belanja Langganan Telepon	16,800,000	12,600,000	1,272,721	12,061,128	0	12,061,128	95.72	538,872
522113	Belanja Langganan Air	9,600,000	6,600,000	739,960	6,512,220	0	6,512,220	98.67	87,780
522141	Belanja Sewa	18,950,000	13,800,000	0	13,800,000	0	13,800,000	100.00	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	18,000,000	28,800,000	0	22,411,500	0	22,411,500	77.82	6,388,500
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Jasa	177,350,000	161,100,000	9,821,282	152,881,396	0	152,881,396	94.90	8,218,604
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	209,392,000	107,184,000	7,111,000	96,209,593	0	96,209,593	89.76	10,974,407
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	7,500,000	0	7,000,000	0	7,000,000	93.33	500,000

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 7
Prog Id : lu_lrbstkb

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	216,592,000	114,684,000	7,111,000	103,209,593	0	103,209,593	89.99	11,474,407
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	1,289,743,000	1,144,879,000	115,653,993	1,107,850,260	0	1,107,850,260	96.77	37,028,740
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAC	1,289,743,000	1,144,879,000	115,653,993	1,107,850,260	0	1,107,850,260	96.77	37,028,740
EAD	Layanan Sarana Internal								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5231	Belanja Pemeliharaan								
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138,230,000	122,620,000	1,131,798	112,899,099	0	112,899,099	92.07	9,720,901
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Pemeliharaan	138,230,000	122,620,000	1,131,798	112,899,099	0	112,899,099	92.07	9,720,901
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	138,230,000	122,620,000	1,131,798	112,899,099	0	112,899,099	92.07	9,720,901
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96,096,000	90,178,000	0	90,176,724	0	90,176,724	100.00	1,276
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96,096,000	90,178,000	0	90,176,724	0	90,176,724	100.00	1,276
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA MODAL	96,096,000	90,178,000	0	90,176,724	0	90,176,724	100.00	1,276

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 8
Prog Id : lu_lrabstkb

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAD	234,326,000	212,798,000	1,131,798	203,075,823	0	203,075,823	95.43	9,722,177
EAE	Layanan Prasarana Internal								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5231	Belanja Pemeliharaan								
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	134,790,000	107,521,000	1,385,000	84,722,000	0	84,722,000	78.80	22,799,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Pemeliharaan	134,790,000	107,521,000	1,385,000	84,722,000	0	84,722,000	78.80	22,799,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	134,790,000	107,521,000	1,385,000	84,722,000	0	84,722,000	78.80	22,799,000
53	BELANJA MODAL								
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan								
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	487,724,000	442,034,000	10,110,000	419,949,583	0	419,949,583	95.00	22,084,417
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Modal Gedung dan Bangunan	487,724,000	442,034,000	10,110,000	419,949,583	0	419,949,583	95.00	22,084,417
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA MODAL	487,724,000	442,034,000	10,110,000	419,949,583	0	419,949,583	95.00	22,084,417
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAE	622,514,000	549,555,000	11,495,000	504,671,583	0	504,671,583	91.83	44,883,417
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4701	2,146,583,000	1,907,232,000	128,280,791	1,815,597,666	0	1,815,597,666	95.20	91,634,334

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 9
Prog Id : lu_lrabstkb

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik								
BMB	Komunikasi Publik								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,848,000	5,280,000	0	5,103,000	0	5,103,000	96.65	177,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,440,000	400,000	0	0	0	0	0.00	400,000
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15,288,000	5,680,000	0	5,103,000	0	5,103,000	89.84	577,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	15,288,000	5,680,000	0	5,103,000	0	5,103,000	89.84	577,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4702.BMB	15,288,000	5,680,000	0	5,103,000	0	5,103,000	89.84	577,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4702	15,288,000	5,680,000	0	5,103,000	0	5,103,000	89.84	577,000
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal								
EAK	Layanan Pengawasan Internal								
52	BELANJA BARANG DAN BARANG								
5241	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri								

Kode Lap : LRBSB 02
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 10
Prog Id : lu_lrabstkb

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA MELALUI KPPN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS SATUAN KERJA : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,400,000	5,960,000	0	3,786,000	0	3,786,000	63.52	2,174,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,440,000	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
	Jumlah Sub Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18,840,000	6,460,000	0	4,286,000	0	4,286,000	66.35	2,174,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG DAN BARANG	18,840,000	6,460,000	0	4,286,000	0	4,286,000	66.35	2,174,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4704.EAK	18,840,000	6,460,000	0	4,286,000	0	4,286,000	66.35	2,174,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 4704	18,840,000	6,460,000	0	4,286,000	0	4,286,000	66.35	2,174,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.WA	2,204,845,000	1,932,730,000	128,948,691	1,836,226,566	0	1,836,226,566	95.01	96,503,434
	JUMLAH BELANJA SUBFUNGSI 01.01	2,461,103,000	2,077,908,000	134,813,491	1,966,195,366	0	1,966,195,366	94.62	111,712,634
	JUMLAH BELANJA FUNGSI 01	2,461,103,000	2,077,908,000	134,813,491	1,966,195,366	0	1,966,195,366	94.62	111,712,634
	JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0	2,461,103,000	2,077,908,000	134,813,491	1,966,195,366	0	1,966,195,366	94.62	111,712,634
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA A	2,461,103,000	2,077,908,000	134,813,491	1,966,195,366	0	1,966,195,366	94.62	111,712,634
	JUMLAH BELANJA TRANSAKSI KAS	2,461,103,000	2,077,908,000	134,813,491	1,966,195,366	0	1,966,195,366	94.62	111,712,634

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPS.B02
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 1
Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESOLON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REALISASI PENDAPATAN
			JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	KAS						
I	PENERIMAAN DALAM NEGERI						
4	PENDAPATAN NEGARA						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
425	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA						
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha						
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN						
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	15,650,000	0	15,650,000	0.00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	82,619,000	0	82,619,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42512	0	0	98,269,000	0	98,269,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 4251	0	0	98,269,000	0	98,269,000	0.00
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN						
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara						
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	704,000,000	186,733,296	737,042,783	0	737,042,783	104.69
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	0	0	0	0	0.00
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	526,000,000	92,244,536	1,007,641,158	0	1,007,641,158	191.57
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1,244,000	400,000	36,523,755	0	36,523,755	2,935.99
	Jumlah Penerimaan 42578	1,231,244,000	279,377,832	1,781,207,696	0	1,781,207,696	144.67

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPS.B02
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 2
Prog Id : lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESOLON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REALISASI PENDAPATAN
			JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETO S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Penerimaan 4257	1,231,244,000	279,377,832	1,781,207,696	0	1,781,207,696	144.67
4258	PENDAPATAN DENDA						
42581	Pendapatan Denda I						
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	1,104,473	0	1,104,473	0.00
	Jumlah Penerimaan 42581	0	0	1,104,473	0	1,104,473	0.00
	Jumlah Penerimaan 4258	0	0	1,104,473	0	1,104,473	0.00
	Jumlah Penerimaan 425	1,231,244,000	279,377,832	1,880,581,169	0	1,880,581,169	152.74
	Jumlah Penerimaan 42	1,231,244,000	279,377,832	1,880,581,169	0	1,880,581,169	152.74
	Jumlah Penerimaan 4	1,231,244,000	279,377,832	1,880,581,169	0	1,880,581,169	152.74
	JUMLAH PENERIMAAN DALAM NEGERI	1,231,244,000	279,377,832	1,880,581,169	0	1,880,581,169	152.74
	JUMLAH PENERIMAAN KAS	1,231,244,000	279,377,832	1,880,581,169	0	1,880,581,169	152.74
	JUMLAH PENERIMAAN KAS DAN NON KAS	1,231,244,000	279,377,832	1,880,581,169	0	1,880,581,169	152.74

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Kode Lap : LRPS.B02
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 1
Prog Id : lu_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7

--- TIDAK ADA DATA YANG DICETAK ---

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

: LRPS.B02
: 25-05-2022
Halaman : 1
Prog Id lu_pendsatk

KEMENTERIAN / LEMBAGA	:	015	KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1	:	09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH PROVINSI	:		KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA	:	506090	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUNAN
JENIS SATUAN KERJA	:	KD	Kantor Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

--- TIDAK ADA DATA YANG DICETAK ---

N E R A C A (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DES 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LSAIKB
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON 1 : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 506090
JENIS KEWENANGAN : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KANWIL II DJKN MEDAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN
Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	36,225,260	0	36,225,260	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	819,181,550	8,791,404	810,390,146	9.218
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	110,500	0	110,500	-
Persediaan	77,482,639	98,694,010	(21,211,371)	(21)
Jumlah ASET LANCAR	932,999,949	107,485,414	825,514,535	768
ASET TETAP				
Tanah	14,642,622,000	10,266,000,000	4,376,622,000	43
Peralatan dan Mesin	3,420,112,407	3,494,935,683	(74,823,276)	(2)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,885,710,062)	(2,826,477,705)	(59,232,357)	2
Peralatan dan Mesin (Netto)	534,402,345	668,457,978	(134,055,633)	(20)
Gedung dan Bangunan	4,253,909,333	3,816,522,000	437,387,333	11
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(385,468,057)	(293,000,177)	(92,467,880)	32
Gedung dan Bangunan (Netto)	3,868,441,276	3,523,521,823	344,919,453	10
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	17,437,750	(17,437,750)	(100)
Jumlah ASET TETAP	19,045,465,621	14,475,417,551	4,570,048,070	32
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	384,800,000	(384,800,000)	(100)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	(383,909,000)	383,909,000	(100)
Jumlah ASET LAINNYA	0	891,000	(891,000)	(100)
Jumlah ASET	19,978,465,570	14,583,793,965	5,394,671,605	37
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga I	828,754,979	17,208,072	811,546,907	4.716
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	828,754,979	17,208,072	811,546,907	4.716
Jumlah KEWAJIBAN	828,754,979	17,208,072	811,546,907	4.716
EKUITAS				
EKUITAS				
EKUITAS	19,149,710,591	14,566,585,893	4,583,124,698	31
Jumlah EKUITAS	19,149,710,591	14,566,585,893	4,583,124,698	31
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	19,978,465,570	14,583,793,965	5,394,671,605	37

NERACA PERCOBAAN (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAIKS

Tanggal : 25-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	36,225,260	0
2	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	819,181,550	0
2	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	110,500	0
2	117111	Barang Konsumsi	77,482,639	0
2	131111	Tanah	14,642,622,000	0
2	132111	Peralatan dan Mesin	3,420,112,407	0
2	133111	Gedung dan Bangunan	4,253,909,333	0
2	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,885,710,062
2	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	385,468,057
2	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	9,573,429
2	212192	Dana Pihak Ketiga	0	819,181,550
2	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,966,195,366
2	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,880,581,169	0
2	313221	Transfer Masuk	0	4,497,116,814
2	391111	Ekuitas	0	14,566,585,893
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	15,650,000
2	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	82,619,000
2	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	110,500
2	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	773,268,043
2	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,007,641,158
2	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	36,523,755
2	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,104,473
2	521111	Beban Keperluan Perkantoran	480,538,585	0
2	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	23,138,520	0
2	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	144,480,000	0
2	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	51,574,500	0
2	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	52,117,066	0
2	521211	Beban Bahan	3,064,800	0
2	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	275,900	0
2	522111	Beban Langganan Listrik	98,885,354	0
2	522112	Beban Langganan Telepon	12,538,323	0
2	522113	Beban Langganan Air	6,402,980	0
2	522141	Beban Sewa	13,800,000	0
2	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	22,411,500	0
2	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84,722,000	0
2	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112,899,099	0
2	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	234,366,593	0
2	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,100,000	0
2	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	224,232,357	0
2	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	92,467,880	0

NERACA PERCOBAAN (AUDITED)

TINGKAT SATUAN KERJA
PEMBUKUAN DASAR AKRUAL
PER 31 DESEMBER 2021

Kode Lap : NPSAIKS
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

TIPE ANGGARAN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
2	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,606,598	0
2	593111	Beban Persediaan konsumsi	121,121,971	0
2	596111	Kerugian Pelepasan Aset	119,779,216	0
JUMLAH			27,046,748,100	27,046,748,100

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DES 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO-KMP

Tanggal : 25-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015

KEMENTERIAN KEUANGAN

ESELON 1 :09

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI :0200

KANWIL II DJKN MEDAN

SATUAN KERJA :506090

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

JENIS KEWENANGAN :KD

Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,818,647,929	1,052,271,845	766,376,084	72.83
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,818,647,929	1,052,271,845	766,376,084	72.83
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	1,818,647,929	1,052,271,845	766,376,084	72.83
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	835,038,081	(835,038,081)	(100.00)
Beban Persediaan	121,121,971	148,496,950	(27,374,979)	(18.43)
Beban Barang dan Jasa	909,227,528	814,834,311	94,393,217	11.58
Beban Pemeliharaan	197,621,099	208,154,573	(10,533,474)	(5.06)
Beban Perjalanan Dinas	250,466,593	282,074,628	(31,608,035)	(11.21)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	318,306,835	295,485,721	22,821,114	7.72
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0	0	0	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)	1,796,744,026	2,584,084,264	(787,340,238)	(30.47)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	21,903,903	(1,531,812,419)	1,553,716,322	(101.43)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				

LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DES 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LPLO-KMP

Tanggal : 25-05-2022

Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :015

KEMENTERIAN KEUANGAN

ESELON 1 :09

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI :0200

KANWIL II DJKN MEDAN

SATUAN KERJA :506090

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN

JENIS KEWENANGAN :KD

Kantor Daerah

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	31 DES 2021	31 DES 2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	98,269,000	0	98,269,000	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	119,779,216	0	119,779,216	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(21,510,216)	0	(21,510,216)	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	106,898,315	(106,898,315)	(100.00)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	98,717,640	(98,717,640)	(100.00)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	8,180,675	(8,180,675)	(100.00)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (D)	(21,510,216)	8,180,675	(29,690,891)	(362.94)
SURPLUS /(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (E= C+D)	393,687	(1,523,631,744)	1,524,025,431	(100.03)
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0	0.00
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
Jumlah Pos Luar Biasa (F)	0	0	0	0.00
SURPLUS/ DEFISIT- LO (E+F)	393,687	(1,523,631,744)	1,524,025,431	(100.03)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31-DES-2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : TINGKAT SATKER

Tanggal : 25-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN / LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 WILAYAH PROVINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
 SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUN
 JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

No	Uraian	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31-DES-2021	31 DES 2020	JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	EKUITAS AWAL	14,566,585,893	14,477,684,048	88,901,845	1
2	SURPLUS / DEFISIT - LO	393,687	(1,523,631,744)	1,524,025,431	(100)
3	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN	0	0	0	-
3.a	Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
3.b	Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	-
3.c	Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	-
3.d	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	-
3.e	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	-
3.f	Koreksi Lain-lain	0	0	0	-
4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,582,731,011	1,612,533,589	2,970,197,422	184
5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4,583,124,698	88,901,845	4,494,222,853	5,055
6	EKUITAS AKHIR	19,149,710,591	14,566,585,893	4,583,124,698	31

REKONSILIASI ASET TETAP
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Kode Lap : LRREK.01
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 1

KODE	NAMA AKUN	NILAI NERACA	NILAI SUB-LEDGER	SELISIH
1	2	3	4	5
131111	Tanah	14,642,622,000	14,642,622,000	0
132111	Peralatan dan Mesin	3,420,112,407	3,420,112,407	0
133111	Gedung dan Bangunan	4,253,909,333	4,253,909,333	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,885,710,062)	(2,885,710,062)	0
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(385,468,057)	(385,468,057)	0

REKONSILIASI PERSEDIAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Kode Lap : LRREK.01
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 1

KODE	NAMA AKUN	NILAI NERACA	NILAI SUB-LEDGER	SELISIH
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	77,482,639	77,482,639	0

NERACA SUBLEDGER BENDAHARA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRREK.01

Tanggal : 25-05-2022

Halaman : 1

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

KODE	DESKRIPSI	NILAI NERACA
1	2	3
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0
A0001	Kas UP Bank	0
A0003	Kwitansi Belum SPJ UP	0
A0004	Bon Pengeluaran UP Tunai	0
A0005	Bon Pengeluaran UP Bank	0
A0008	Kas UP Bank	0
A0009	Kas Umum	0
	Jumlah Subledger	0
	Selisih	0
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	36,225,260
A0007	Kas UP KKP Tunai	0
B0001	Kas TUP Bank	0
B0008	Kas TUP Bank	0
B0009	Kas Tup Bank	0
	Jumlah Subledger	0
	Selisih	36,225,260
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0
A0006	Kas UP KKP di Bank	0
C0001	Kas Bank Potongan Pajak	0
C0002	Kas Tunai Potongan Pajak	0
C0004	Kas Tunai Potongan Pajak di BPP	0
C0005	Kas Bank Potongan Pajak di BPP	0
E0001	Utang Perwakilan Bendahara	0
E0002	Kas Tunai LS Bendahara	0
E0004	Bon Pengeluaran LS Tunai	0
E0005	Bon Pengeluaran LS Bank	0
G0001	Setoran PNB	0
G0002	Setoran PNB	0
	Jumlah Subledger	0
	Selisih	0

REKONSILIASI PIUTANG
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROPINSI : 0200 KANWIL II DJKN MEDAN
SATUAN KERJA : 506090 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDEMPUAN
JENIS KEWENANGAN : KD Kantor Daerah

Kode Lap : LRREK.01
Tanggal : 25-05-2022
Halaman : 1

Kode Akun	Nama Akun	Nilai Neraca	Nilai Subledger	Selisih
-----------	-----------	--------------	-----------------	---------

Total

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
LAPORAN PADA KPKNL PADANGSIDIMPUAN
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

• **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN dalam Rangka Penyusunan LKPP;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN : tidak perlu rekonsiliasi ke KPKNL.



- **Entitas Pelaporan**

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

KPKNL Padangsidimpuan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pembinaan Akuntansi Instansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

- **Periode Laporan**

CaLBMN ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021) dan merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPKNL Padangsidempuan.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan. Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bias meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Perkiraan Standar. Tujuan kapitalisasi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN, dan mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh KPKNL Padangsidempuan.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebesar Rp22.381.166.241,-(dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp17.970.884.184,- (tujuh belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.403.668.057,-(lima milyar empat ratus tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) nilai mutasi kurang yang terjadi selama periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp993.386.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);

-
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
 13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada KPKNL Padangsidimpuan;
 14. Laporan PNBPN yang terkait dengan Pengelolaan BMN; dan
 15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2021

1. Saldo Awal Tahunan Tahun Anggaran 2021

Nilai BMN per 1 Januari tahun 2021 pada KPKNL Padangsidempuan adalah sebesar sebesar Rp17.970.884.184,- (tujuh belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp22.316.643.740,- (dua puluh dua milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp64.522.501,- (enam puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus satu rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun Anggaran 2021

Mutasi BMN per Periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna sebesar Rp77.482.639,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Tahunan sebesar Rp98.694.010,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sepuluh rupiah), mutasi tambah selama periode laporan sebesar Rp99.910.600,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) dan mutasi kurang persediaan selama periode laporan sebesar Rp121.121.971,- (seratus dua puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Nilai
		Tambah	Kurang	
Barang Konsumsi	99.910.600	99.910.600	121.121.971	77.482.639
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Jumlah	99.910.600	99.910.600	121.121.971	77.482.639

b. Tanah

Saldo tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.642.622.000,- (empat belas milyar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 3.540 m² dengan nilai sebesar Rp10.266.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah), mutasi tambah seluas 2.287 m² dengan nilai sebesar Rp4.376.622.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), mutasi kurang 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

terdapat mutasi tambah dan tidak terdapat mutasi kurang pada BMN berupa tanah.

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	5.827	14.642.622.000
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Tidak terdapat tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan dan tidak terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kuasa Pengguna Barang.

c. Peralatan Dan Mesin

Saldo Akhir Peralatan dan Mesin Laporan Barang Kuasa Pengguna periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.427.134.908,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan rupiah) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar sebesar Rp3.501.958.184,- (tiga milyar lima ratus satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah), mutasi tambah sebesar Rp90.176.724,- (sembilan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), dan mutasi kurang sebesar 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Nilai
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan	3.501.958.184	90.176.724	165.000.000	3.427.134.908

Mesin				
Jumlah	3.501.958.184	90.176.724	165.000.000	3.427.134.908

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Bantu (3.01.03);

Saldo alat bantu (3.01.03) pada satuan kerja KPKNL Padangsidimpuan sebesar Rp246.125.000,-(dua ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp246.125.000,-(dua ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Bantu	0	0

Mutasi kurang alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Bantu	0	0

Dari jumlah alat bantu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	246.125.000
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	0	-

Akumulasi penyusutan alat bantu pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp87.901.785,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
------	------------	-------------------------	------------

Alat Bantu	246.125.000	87.901.785	158.223.215
------------	-------------	------------	-------------

2) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01);

Saldo alat angkutan darat bermotor (3.02.01) pada satuan kerja KPKNL Padangsidimpuan sebesar Rp720.962.499,-(tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar 10 unit dengan nilai sebesar Rp885.962.499,-(delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 1 unit dengan nilai sebesar Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Mutasi tambah alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0

Mutasi kurang alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Angkutan Darat Bermotor	165.000.000	0

Dari jumlah alat angkutan darat bermotor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	42.870.429
Rusak Ringan	7	678.092.070
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang alat angkut darat bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 unit/Rp165.000.000,-.

Akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp696.384.429,- (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Angkutan Darat Bermotor	720.962.499	696.384.429	24.578.070

3) Alat Angkut Darat Tak Bermotor (3.02.02)

Saldo alat angkut darat tak bermotor (3.02.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal alat angkut darat tak bermotor dengan total jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah).

Mutasi tambah alat angkut darat tak bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0

Mutasi kurang alat angkut darat tak bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0

Dari jumlah alat angkut darat tak bermotor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	-
Rusak Ringan	1	1.750.000
Rusak Berat	0	-

Akumulasi penyusutan alat angkutan darat tak bermotor pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.750.000	1.750.000	0

4) Alat Bengkel Tak Bermesin (3.03.02);

Saldo alat bengkel tak bermesin (3.03.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp737.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal alat bengkel tak bermesin dengan total jumlah barang sebesar 2 unit dengan nilai sebesar Rp737.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah alat bengkel tak bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0

Mutasi kurang alat bengkel tak bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0

Dari jumlah alat bengkel tak bermesin di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	-
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	4	737.000

Akumulasi penyusutan alat bengkel tak bermesin pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.001.000,- (satu juta seribu rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Bengkel Tak Bermesin	737.000	737.000	0

5) Alat Ukur (3.03.03);

Saldo alat ukur (3.03.03) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.440.987,- (lima belas juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 8 buah dengan nilai sebesar Rp15.440.987,- (lima belas juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). mutasi tambah jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah alat ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Ukur	0	0

Mutasi kurang alat ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Ukur	0	0

Dari jumlah alat ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	7	9.240.987
Rusak Ringan	0	-
Rusak Berat	1	6.200.000

Akumulasi penyusutan alat ukur pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.668.686,- (dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam

rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Ukur	15.440.987	14.516.889	924.098

6) ALAT KANTOR (3.05.01);

Saldo alat kantor (3.05.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp634.851.550,- (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 112 buah dengan nilai sebesar Rp614.331.050,- (enam ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima puluh rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 8 unit dengan nilai sebesar Rp20.520.500,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah alat kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Kantor	20.520.500	0

Mutasi kurang alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Kantor	0	0

Dari jumlah alat kantor di atas, berdasarkan status kondisinya sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	44	328.813.050
Rusak Ringan	34	203.309.000
Rusak Berat	42	102.729.500

Akumulasi penyusutan alat kantor pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp563.364.075,- (lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Kantor	634.851.550	563.364.075	71.487.475

7) Alat Rumah Tangga (3.05.02);

Saldo alat rumah tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp659.320.709,- (enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 325 buah dengan nilai sebesar Rp589.664.485- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) mutasi tambah jumlah barang 4 unit dengan nilai sebesar sebesar Rp69.656.224,- (enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dan mutasi kurang jumlah 0 barang unit dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah alat rumah tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Rumah Tangga	69.656.224	0

Mutasi kurang alat rumah tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Rumah Tangga	0	0

Dari jumlah alat rumah tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	95	306.941.909
Rusak Ringan	80	101.912.000
Rusak Berat	150	250.466.800

Akumulasi penyusutan alat rumah tangga pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp509.204.264,- (lima ratus sembilan juta dua ratus empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Rumah Tangga	659.320.709	509.204.264	150.116.445

8) Alat Studio (3.06.01);

Saldo alat studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester Itahun anggaran 2021 sebesar Rp254.178.535,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 16 buah dengan nilai sebesar Rp254.178.535,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang 0 dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah alat studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Studio	0	0

Mutasi kurang alat studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Studio	0	0

Dari jumlah alat studio di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	18	266.566.535
Rusak Ringan	7	30.328.000
Rusak Berat	0	0

Akumulasi penyusutan alat studio pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp210.821.197,- (dua ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh

rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Studio	254.178.535	210.821.197	43.357.338

9) ALAT KOMUNIKASI (3.06.02);

Saldo alat komunikasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester Itahun anggaran 2021 sebesar Rp16.617.000,- (enam belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 13 buah dengan nilai sebesar Rp16.617.000,- (enam belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 meter dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah)

Mutasi tambah alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Komunikasi	0	0

Mutasi kurang alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Komunikasi	0	0

Dari jumlah alat komunikasi, komunikasi dan pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	13	16.617.000
Rusak Berat	0	0

Akumulasi penyusutan alat komunikasi pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Semester Itahun anggaran 2021 sebesar Rp16.617.000,- (enam belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Komunikasi	16.617.000	16.617.000	0

10) KOMPUTER UNIT (3.10.01);

Saldo computer unit pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester Itahun anggaran 2021 sebesar Rp530.451.430,- (lima ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 36 buah dengan nilai sebesar Rp530.451.430,- (lima ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Komputer Unit	0	0

Mutasi kurang alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Komputer Unit	0	0

Dari jumlah Komputerunit di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	8	102.927.426
Rusak Ringan	16	264.618.578
Rusak Berat	12	162.905.426

Akumulasi penyusutan computer Unit pada laporan penyusutan barang kuasa

pengguna Tahunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp507.388.518,-(lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Komputer Unit	530.451.430	484.413.125	46.038.305

11) PERALATAN KOMPUTER (3.10.02);

Saldo peralatan computer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester Itahun anggaran 2021 sebesar Rp346.700.198,- (tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 49 buah dengan nilai sebesar sebesar Rp346.700.198,- (tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Peralatan Komputer	0	0

Mutasi kurang alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Peralatan Komputer	0	0

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	9	208.869.008
Rusak Ringan	18	89.266.990
Rusak Berat	22	48.564.200

Akumulasi penyusutan Peralatan Komputer pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp306.615.548,-(tiga

ratus enam juta enam ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan Komputer	346.700.198	306.615.548	40.084.650

12) Alat Eksplorasi Topografi (31101)

Saldo alat eksplorasi topografi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp0,- (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Eksplorasi Topografi	0	0

Mutasi kurang alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Alat Eksplorasi Topografi	0	0

Dari jumlah eksplorasi topografi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Akumulasi penyusutan alat eksplorasi topografi pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Nama	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Alat Eksplorasi Topografi	0	0	0

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.297.909.333,- (Empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp3.816.522.000,- (tiga milyar delapan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 4 buah dengan nilai sebesar Rp626.628.333,- (enam ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang 2 buah sebesar Rp145.241.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung Kantor Permanen

Saldo bangunan gedung kantor permanen pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.253.909.333,- (empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp3.816.522.000,- (tiga milyar delapan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah). Mutasi tambah jumlah barang 1 buah sebesar Rp 569.128.333,- (lima ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang 1 sebesar Rp131.741.000,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Mutasi tambah bangunan gedung kantor permanen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	569.128.333	0

Mutasi kurang bangunan gedung kantor permanen tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	131.741.000	0

Dari jumlah gedung dan bangunan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	1	4.253.909.333

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp385.468.057,-(tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah).

3) Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen

Saldo rumah Negara golongan II tipe D pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), mutasi tambah jumlah barang 0 sebesar Rp0,- (nol rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Mutasi tambah rumah Negara golongan II tipe D tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	0

Mutasi kurang rumah Negara golongan II tipe D tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	0

Dari jumlah rumah Negara golongan II tipe D di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	2	44.000.000
Rusak Berat	0	0

4) Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen

Akumulasi Penyusutan Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,- (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp17.437.750,-(tujuh belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), mutasi tambah sebesar Rp419.949.583,- (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp437.387.333,-(empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan

Saldo Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,- (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp17.437.750,-(tujuh belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), mutasi tambah sebesar Rp419.949.583,- (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp Rp437.387.333,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
------------------------	-------------------------	--------------------------

Bangunan Gedung Kantor Permanen	419.949.583	0
---------------------------------	-------------	---

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakompatible (Rp)	Ekstrakompatible (Rp)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	437.387.333	0

b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dalam pengerjaan pada laporan penyusutan barang kuasa pengguna Tahunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp0,-(nol rupiah).

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp22.445.148.880,-(dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Gedung dan Bangunan.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Nilai Intra	Nilai Ekstra	Nilai Gabungan
I	Aset Lancar			
1	Barang Konsumsi	77.482.639	-	77.482.639
	Sub Jumlah (I)	77.482.639	-	77.482.639
II	Aset Tetap			
1	Tanah	14.642.622.000	-	14.642.622.000
2	Peralatan dan Mesin	3.427.134.908	-	3.427.134.908
3	Gedung dan Bangunan	4.297.909.333	-	4.297.909.333
4	KDP	0	-	0

	Sub Jumlah (II)	22.367.666.241	-	22.367.666.241
	TOTAL	22.445.148.880	-	22.445.148.880

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan tahun anggaran 2021 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
		Rp	Rp	Rp
I	Aset Tetap			
1	Peralatan dan Mesin	2.892.325.312	-	2.892.325.312
2	Gedung dan Bangunan	397.348.057	-	397.348.057
	Sub Jumlah (I)	3.289.673.369	-	3.289.673.369

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 perakun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	77.482.639	77.482.639	-
2	Tanah	14.642.622.000	14.642.622.000	
3	Gedung dan Bangunan	4.297.909.333	4.297.909.333	
4	Peralatan dan Mesin	3.427.134.908	3.427.134.908	-
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.892.325.312)	(2.892.325.312)	-
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(397.348.057)	(397.348.057)	
	TOTAL	19.155.475.511	19.155.475.511	-

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan Barang dan laporan keuangan.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
2	2016	7.049.072.735		
3	2017	14.475.011.274	7.425.938.539	105,35
4	2018	14.337.648.687	(137.362.587)	0,95
5	2019	14.379.572.127	41.923.440	0,29
6	2020	14.346.787.241	(32.784.886)	0,23
7	2021	19.155.475.511	4.808.688.270	1.78

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada KPKNL Padangsidimpuan per Tahunan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Sudah Ditetapkan Status Penggunaannya	Belum Ditetapkan Status Penggunaannya
1	Tanah	14.642.622.000	-
2	Peralatan dan Mesin	3.427.134.908	-
3	Gedung dan Bangunan	4.297.909.333	-
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah	22.367.666.241	-

Untuk BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya tersebut akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2020.

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam Proses Pengajuan ke Pengguna	-	-	-	-	-
2	Dalam Proses Pengajuan ke Pengelola	-	-	-	-	-
3	Dalam Proses ke Pengelola	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola	-	-	-	-	-

5	a. dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. ditolak	-	-	-	-	-
	c. disetujui	-	-	-	-	-
6	Dalam Proses Tindaklanjut Pengguna Barang	-	-	-	-	-
7	Telah diterbitkan keputusan dari Pengguna Barang	-	-	-	-	-
8	Selesai Serah Terima	-	-	-	-	-

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	-
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tidak terdapat BMN Idle pada KPKNL Padangsidimpuan

Padangsidimpuan , 19 Januari 2022
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang

Raden Hariyadi Murti Kurniawan
 NIP 197510071996021001

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERIODE TA 2021 (Audited)**

Kode Satker dan Nama Satker : 015.09.0200.506090.000.KD)KPKNL PADANGSIDIMPUAN

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak
1. Pernyataan Tanggung Jawab	V	Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face	V	Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1. Neraca Percobaan Akrua	V	Ada
2. Neraca Percobaan Kas	V	Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	V	Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK		
	Sama	Tidak
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?	V	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Neraca Balance	Ada	Tidak
1. Adakah Satker Neraanya tidak balance ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance "	V	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V	Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V	Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>		
NERACA PERCOBAAN AKRUAL		
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)	V	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"	V	Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN		
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.	V	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)	V	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)	V	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain	V	Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (<i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i>)		V	Tidak
2. Apakah Saldo Akun 218211 akhir tahun berkurang dibanding awal tahun?		V	Tidak
3. Jika berkurang, apakah ada pengesahan Hibah Langsung TAYL (MPHL-BJS TAYL) ?		V	Tidak
<i>Akun 218211 hanya dapat berkurang jika ada pengesahan Hibah Langsung TAYL. Cek apakah ada pengurangan dengan Jurnal, teliti kebenaran/keabsahan jurnal tsb.)</i>			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117-Penyediaan Nilai Persediaan		V	Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		V	Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		V	Tidak
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		V	Tidak
5. Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya bernilai wajar?		V	Tidak
6. Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah		V	Tidak
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>			
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)			
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK	-		
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	0		
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?		V	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx		V	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		V	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		V	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		V	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		V	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		V	Tidak
2. Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		V	Tidak

Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		V	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		V	Tidak
2. Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>		V	Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		V	Tidak
TELAH TERKAIT BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		V	Tidak
<i>Jika ada, berarti ada pendapatan & Belanja BLU yang belum di SP3B-BLU-kan, adakah penjelasannya ?</i>			
2. Apakah telah melakukan identifikasi transaksi belanja/pendapatan dengan Satker Pemerintah Pusat lainnya (Untuk eliminasi BLU) ?	V		Ya
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		V	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		V	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	0		
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311	0		
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311	-		
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		V	Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>			
5 Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		V	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>			
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		V	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		V	Tidak
3. Adakah beban bunga		V	Tidak
4. Adakah beban subsidi		V	Tidak
5. Adakah beban hibah		V	Tidak
6. Adakah beban transfer		V	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		V	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)		V	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	V		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	V		Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		V	Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya. Untuk Triwulan III, Tidak ada revaluasi aset tetap dan jurnal Take Out Revaluasi</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?		V	Tidak
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.			

N E R A C A

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		V	Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Dari kolom perbandingan antara 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		V	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2018, Apakah demikian?	V		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendhara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	V		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		V	Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Tidak
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Tidak
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		V	Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Tidak
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:		V	Tidak
- Beban Persediaan (di LO)		V	Tidak
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		V	Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		V	Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ada
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ada

Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II

Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos						Ada	Tidak	Seharusnya	
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?							V	Tidak	
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?							V	Tidak	
7. Adakah beban bansos?							V	Tidak	
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?							V	Tidak	
Pengecekan Jurnal Akrua						Ada	Tidak	Seharusnya	
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?							V	Tidak	
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?							V	Tidak	
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?							V	Tidak	
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca							V	Tidak	
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?						V		Ada	
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca						V		Ada	
KESESUAIAN DENGAN L-BMN									
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN						Ya/Ada	Tidak	Seharusnya	
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?							V	Tidak	
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan September 2020 di e-Rekon&LK?							V	Tidak	
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"									
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?							V	Tidak	
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?								Ya	
Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon						Ada	Tidak	Seharusnya	
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi ,									
1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")							V	Tidak	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN									
							Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")							V	Tidak	
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?							V	Tidak	
Pengecekan TDK									
1.	Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo						V	Tidak	
2.	Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?						V	Tidak	
3.	Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS						V	Tidak	
4.	Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo						V	Tidak	
5.	Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo						V	Tidak	
6.	Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo						V	Tidak	
e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo									

SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Satker Konsolidasian		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Jurnal tahun 2021 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	V		Ya
2.	Apakah telah dilakukan Jurnal Take-Out Reval dengan benar ?	V		Ya
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021</i>				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing KL)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?	V		Ya
2.	Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	V		Ya
3.	Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		V	Tidak
4.	Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	V		Ya
5.	Adakan PNBPN digunakan langsung?		V	Tidak
6.	Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	V		Ya
7.	Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	V		Ya
8.				Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	V		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>				
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)		Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2.	Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	V		Ya
3.	Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	V		Ya
4.	Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	V		Ya
5.	Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	V		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>				
7.	Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	V		Ya
8.	Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	V		Ya

ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	V		Ya
2.	Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang	V		Ya
3.	Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Triwulan II 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021	V		Ya
4.	Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)	V		Ya

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta
hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



Ahmad Imam Ritonga
NIP. 197806062000011002

Padangsidempuan, 13 Mei 2022

Penelaah,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Olivia S.', written over a horizontal line.

Olivia S
NIP 199101152020022003

**CHECKLIST PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PERIODE TA 2021**

Kode BAEs1WilayahSatker dan Nama Satker/Eselon I/Wilayah/KL: (017) KPKNL Padangsidempuan

Uraian		Kondisi		Seharusnya
Beri tanda centang (v) sesuai keadaan pada saat pengecekan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
		Sudah	Belum	Seharusnya
1.	Saldo Neraca per 1 Januari 2021 sama dengan saldo Neraca per 31 Desember 2020 <i>Audited</i>	✓		Sudah
2.	Memastikan seluruh transaksi keuangan, aset, dan persediaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 telah diinput secara menyeluruh pada aplikasi SAKTI.	✓		Sudah
3.	Melakukan jurnal penyesuaian antar akun beban-LO apabila tidak/belum melakukan koreksi SPM/SP2D atas belanja, terkait Pandemi COVID-19	✓		Sudah
4.	Mengungkapkan dan menyajikan informasi pos-pos Laporan Keuangan secara memadai dalam CaLK, terkait Pandemi COVID-19	✓		Sudah
5.	Seluruh data aset dan persediaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 sudah dilakukan pendetailan di modul aset dan persediaan SAKTI	✓		Sudah
6.	Angka-angka yang akan disajikan di LK Triwulan IV 2021 sudah cukup akurat dengan selalu monitoring pada MonSakti maupun e-Rekon&LK G2.	✓		Sudah
7.	Melakukan telaah atas Laporan Keuangan	✓		Sudah
8.	menyelesaikan <i>pending matters</i> terkait pencatatan nilai aset	✓		Sudah
9.	Pemutakhiran data saldo rekening dan mengunggah dokumen rekening koran periode 31 Desember 2021 pada tautan sesuai Nota Dinas.	✓		Sudah
10.	Mengunggah LPSK Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 yang sudah bertandatangan pada tautan sesuai Nota Dinas.	✓		Sudah
11.	Mengunggah LPJ Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan periode 31 Desember 2021 pada tautan sesuai Nota Dinas.	✓		Sudah
12.	Menyampaikan pemutakhiran tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK periode pemeriksaan sampai dengan tahun 2021 pada Sekretariat DJKN	✓		Sudah
14.	Implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019.	✓		Sudah

LAMPIRAN CHECKLIST PELAKSANAAN PENYUSUNAN LK 2021 (Audited)

*"Uraikan penjelasan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA,
hal-hal lainnya yang diperlukan"*

serta

Mengetahui
Kasubag Umum

Ahmad Irfham Ritonga
NIP. 197806062000011002

Padangsidempuan, 13 Mei 2022

Operator GLP

Olivia S

NIP 199101152019022003

